



PENDEKATAN EVALUASI HOLISTIK DALAM MENGUKUR KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN PERSAMPAHAN DI KOTA BAUBAU

¹Farid Yusuf Nur Achmad

Program Studi Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Muhammadiyah Buton
Jl. Betoambari No. 36 Baubau. Sulawesi Tenggara
e-mail: faridyusuf.umb@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: Januari 2024

Disetujui: Januari 2024

Dipublikasi: 29 Februari 2024

Kata Kunci : keberlanjutan, kebijakan persampahan, evaluasi holistik, Kota Baubau, pengelolaan sampah.

Korespondensi Author:
Farid Yusuf Nur Achmad

Abstrak

Pendekatan evaluasi holistik digunakan untuk mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Metodologi penelitian melibatkan analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan survei masyarakat. Evaluasi holistik mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kebijakan persampahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak positif pada efisiensi pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, dan keseimbangan ekosistem lokal. Kendati demikian, tantangan masih terjadi dalam pembiayaan, edukasi masyarakat, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pihak berkepentingan dalam perumusan kebijakan yang lebih berkelanjutan di bidang persampahan.

1. Pendahuluan

Penyebab utama dari perubahan lingkungan hidup yang merugikan adalah pertumbuhan populasi yang terus meningkat tanpa diimbangi oleh peningkatan perilaku masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup, masalah sampah semakin bertambah baik dari segi volume, jenis, maupun karakteristiknya. Permasalahan ini telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian serius, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari pengumpulan sampah hingga proses pengolahan. Berdasarkan Amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1), setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan publik dalam pengelolaan sampah sebagai tanggung jawabnya, meskipun pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha serta melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat yang aktif dalam bidang penanganan sampah. (Fadiah et al., 2021; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Kota Baubau, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah kemajuan tersebut, persoalan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kebijakan persampahan yang belum optimal di Kota Baubau menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai permasalahan persampahan di Kota Baubau, faktor penyebab, dampaknya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kebijakan persampahan menjadi lebih efektif.

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan persampahan di Kota Baubau adalah ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai. Fasilitas pengolahan sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), dan sistem pengumpulan sampah masih jauh dari ideal. Kurangnya

investasi dalam pembangunan infrastruktur persampahan membuat pengelolaan sampah di Kota Baubau belum bisa mencapai standar yang diinginkan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah masih rendah. Banyak warga yang tidak memahami dampak buruk dari perilaku membuang sampah sembarangan, seperti pencemaran lingkungan dan kerugian ekonomi. Edukasi mengenai pemilahan sampah, pengurangan sampah, dan kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah lokasi yang digunakan untuk membuang sampah secara terakhir setelah melalui proses pengolahan dan pemilahan. TPA dirancang untuk mengelola sampah secara efisien dan aman agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Proses di TPA meliputi pemadaman, pemadatan, dan penutupan sampah dengan lapisan tanah atau bahan impermeabel lainnya untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Penting untuk memilih lokasi TPA yang tepat, mengelola limbah dengan baik, dan mematuhi regulasi lingkungan demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. (Mulyadi et al., 2020)

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan dalam optimalisasi kebijakan persampahan di Kota Baubau. Dibutuhkan tenaga ahli dan dana yang cukup untuk melakukan pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur persampahan. Selain itu, kurangnya personel yang terlatih dalam pengelolaan sampah juga dapat mempengaruhi kinerja sistem persampahan secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi yang dibawa oleh perusahaan swasta dapat menjadi solusi inovatif dalam peningkatan efisiensi pengelolaan sampah. Namun, hingga saat ini, kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta membuat potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Dampak Kebijakan Persampahan yang Belum Optimal di Kota Baubau, dari aspek pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari air tanah, sungai, dan laut, mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak efektif juga berdampak pada kerugian ekonomi. Biaya untuk membersihkan lingkungan yang tercemar dan merawat kesehatan masyarakat akibat dampak sampah dapat memberatkan anggaran pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan persampahan yang belum optimal dapat berpotensi menyebabkan konflik sosial. Protes dan demonstrasi masyarakat terhadap masalah sampah dapat merugikan citra pemerintah dan mengganggu ketertiban umum.

Beberapa solusi menuju kebijakan persampahan yang Lebih Optimal di Kota Baubau, yakni Peningkatan Infrastruktur Persampahan yang memadai. Investasi dalam pembangunan infrastruktur persampahan menjadi langkah krusial. Pemerintah setempat perlu memprioritaskan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan, serta memastikan ketersediaan TPA yang sesuai dengan standar keamanan dan lingkungan. Perlunya Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat yang langsung dikomandoi oleh Pejabat RT dan RW, Peningkatan kesadaran masyarakat perlu didukung oleh program edukasi dan penyuluhan yang intensif. Melibatkan masyarakat dalam pemilahan sampah dan memberikan pemahaman tentang dampak positifnya bagi lingkungan dapat menjadi langkah awal yang efektif. Serta aspek penguatan sumber daya manusia dan Anggaran, Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pelatihan reguler dan peningkatan keterampilan dalam teknik pengelolaan sampah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor persampahan juga diperlukan.

Dibutuhkan intensitas dari stimulasi kerjasama pemerintah dan pihak swasta. Pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu didorong. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang berkontribusi pada pengelolaan sampah, seperti insentif pajak atau fasilitas lainnya. Kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan solusi inovatif dalam penanganan sampah.

Dengan meningkatkan infrastruktur, kesadaran masyarakat, sumber daya manusia, dan kerjasama antar sektor, Kota Baubau dapat mengatasi permasalahan persampahan dan menuju arah yang lebih berkelanjutan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya tahan terhadap dampak negatif sampah.

Ketergantungan pada pemangku kepentingan: Kebijakan persampahan di Kota Baubau bergantung pada pemangku kepentingan pihak-pihak, seperti pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, yang mungkin tidak selalu efektif dalam menjaga kebersihan (Rinny, 2009).

Ketergantungan pada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kaitannya dengan pendekatan evaluasi holistik dalam mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau menunjukkan pentingnya melibatkan berbagai pihak terkait secara komprehensif. Pendekatan holistik dalam evaluasi keberlanjutan kebijakan persampahan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh, serta mengakui ketergantungan antarunsur tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, industri, dan lembaga terkait dalam proses evaluasi akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan beragam aspek dan mendukung keberlanjutan secara menyeluruh (Said, L.O., Mardiyono, & Noor, 2015). (Fadliah et al., 2021). Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam keberlanjutan kebijakan persampahan, seperti yang terlihat dalam pengelolaan hubungan pemangku kepentingan dan harapan pemangku kepentingan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata dan pengembangan masyarakat lokal (Wulandari, 2018). (Luviani, 2019). Melalui kolaborasi, advokasi, dan pendidikan, pemangku kepentingan dapat berperan dalam mencapai keberlanjutan kebijakan persampahan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara komprehensif (Bakti et al., 2023). Dengan demikian, ketergantungan pada pemangku kepentingan dalam pendekatan evaluasi holistik merupakan strategi yang relevan dalam mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Melibatkan berbagai pihak terkait akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang komprehensif dan mendukung keberlanjutan secara menyeluruh.

Kurangnya kolaborasi dan komunikasi, Tidak ada mekanisme yang efektif untuk menjaga kolaborasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan persampahan (Fadliah, N., Fatmawati, F., & Parawu, 2021). Kurangnya kolaborasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan penelitian pendekatan evaluasi holistik dalam mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam konteks pengembangan keberlanjutan kebijakan.

Sebuah penelitian tentang strategi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif menunjukkan bahwa kolaborasi dan jaringan antara pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam memperluas peluang bisnis dan pertukaran pengetahuan. Selain itu, penelitian lain menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam mengelola hubungan dan harapan mereka, khususnya dalam bisnis perhotelan (Wulandari, 2018). Dengan demikian, dalam konteks evaluasi holistik keberlanjutan kebijakan persampahan, kurangnya kolaborasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan dapat menghambat upaya untuk mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kolaborasi aktif dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan secara menyeluruh (Ngabalin et al., 2023) (Wulandari, 2018).

Dalam konteks ini, pendekatan evaluasi holistik menjadi penting untuk mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang pendekatan evaluasi holistik dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan persampahan di Kota Baubau.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi holistik untuk mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Pendekatan evaluasi holistik adalah metode penilaian yang melihat keberlanjutan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Bungin, 2015; Moleong, 2017; Silalahi, 2010) Dalam penelitian ini, pendekatan evaluasi holistik digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan gambaran latar belakang dan pokok permasalahan dibentuk variabel dalam penelitian ini adalah keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Variabel ini akan diukur dari berbagai aspek, seperti efektivitas kebijakan, efisiensi pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, dan dampak lingkungan. (Bungin, 2017; Sugiyono, 2011)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Baubau yang terlibat dalam kebijakan persampahan. Sampel penelitian diambil dari masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di Kota Baubau, seperti petugas kebersihan, pengusaha pengelola

sampah, dan masyarakat yang aktif dalam program pengelolaan sampah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (Silalahi, 2010; Sugiyono, 2011) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Baubau. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait kebijakan persampahan di Kota Baubau, seperti peraturan daerah, laporan keuangan, dan dokumen program pengelolaan sampah, data-data tersebut bersumber dari observasi, wawancara dan studi pustaka dengan obyek yakni masyarakat, petugas kebersihan, pengusaha pengelola sampah, dan dokumen-dokumen terkait kebijakan persampahan di Kota Baubau. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari responden dan dokumen-dokumen terkait kebijakan persampahan di Kota Baubau. Selain itu, teknik analisis regresi juga akan digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. (Bungin, 2015; Silalahi, 2010; Sugiyono, 2011)

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dalam mengevaluasi keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau dengan menggunakan pendekatan evaluasi holistik.

1) Efektivitas Kebijakan Persampahan.

Dalam menilai efektivitas kebijakan persampahan, kami mengumpulkan data terkait tingkat pengurangan sampah dan efisiensi pengelolaan sampah. Hasil survei kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah di rumah tangga. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 43 kelurahan di Kota Baubau. Namun, masih terdapat tantangan terkait ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di wilayah pinggiran kota, kawasan pasar Karya Nugraha Baubau dan Pasar Wameo. Pasar Laelangi. Juga terjadi di beberapa rukun tetangga pada hampir seluruh kelurahan di Kota Baubau. Infrastruktur tersebut antara lain tidak adanya fasilitas pembuangan sampah sementara, sebelum diangkut oleh armada sampah pada jam 07.00 – sampai dengan 09.00 wita.

2) Efisiensi Kebijakan Persampahan.

Analisis efisiensi kebijakan persampahan melibatkan evaluasi biaya operasional dan alokasi sumber daya. Data keuangan dari perusahaan pengelola sampah menunjukkan bahwa biaya operasional untuk pengelolaan sampah telah meningkat seiring dengan peningkatan layanan dan infrastruktur yang disediakan. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi, terutama dalam pengelolaan transportasi dan pengolahan sampah.

3) Dampak Lingkungan.

Dampak kebijakan persampahan terhadap lingkungan dinilai melalui penurunan polusi dan upaya pengelolaan limbah yang lebih baik. Hasil analisis data kualitatif menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan di sekitar TPA dan sungai-sungai yang sebelumnya tercemar oleh sampah. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah cair untuk mengurangi pencemaran air. Berdasarkan data yang diperoleh pada dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau bahwa jumlah sampah yang dipungut oleh 15 Armada Mobil sampah dan 5 unit motor sampah berkisar 90 Ton setiap harinya, angka ini akan bertambah jika memasuki bulan Ramadhan dan hari-hari besar lainnya.

4) Dampak Sosial.

Dampak sosial kebijakan persampahan dievaluasi melalui partisipasi masyarakat dan peningkatan kesadaran lingkungan. Survei kepada masyarakat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam program pemilahan sampah dan kegiatan bersih-bersih lingkungan telah meningkat secara signifikan. Hal ini menandakan adanya perubahan perilaku positif di kalangan masyarakat terkait pengelolaan sampah.

5) Keberlanjutan Kelembagaan.

Keberlanjutan kelembagaan adalah aspek penting dalam evaluasi kebijakan persampahan. Melalui wawancara dengan pihak terkait, kami menemukan bahwa keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau tergantung pada dukungan politik yang berkelanjutan,

serta kesiapan lembaga terkait untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, Evaluasi holistik terhadap keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau menunjukkan progres yang signifikan dalam beberapa aspek, namun juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Salah satu keberhasilan utama adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam kebijakan persampahan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di wilayah pinggiran kota yang masih kurang terlayani. Upaya perbaikan infrastruktur ini memerlukan investasi yang cukup besar dan koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan pengelola sampah, dan masyarakat.

Pada fase lain, meskipun terdapat peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi kebijakan persampahan, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Misalnya, penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Dampak lingkungan kebijakan persampahan juga menjadi fokus penting dalam evaluasi holistik ini. Meskipun terdapat perbaikan dalam penurunan polusi dan pengelolaan limbah, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan limbah, terutama dalam menghadapi tantangan pencemaran air. Untuk hal tersebut perlu menjadi catatan pemerintah Kota Baubau bahwa keberlanjutan kelembagaan menjadi faktor krusial dalam memastikan kelangsungan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Dukungan politik yang berkelanjutan dan kesiapan lembaga terkait untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan persampahan di masa depan. Perlu diketahui bahwa pendekatan evaluasi holistik merupakan pendekatan yang efektif dalam mengukur keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan persampahan, serta menyoroti tantangan dan potensi perbaikan di masa depan. Dengan memperhatikan hasil evaluasi ini, diharapkan pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan manajemen sampah dan mencapai keberlanjutan yang lebih baik di Kota Baubau.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang keberlanjutan kebijakan persampahan di Kota Baubau menggunakan pendekatan evaluasi holistik. Dengan menganalisis efektivitas, efisiensi, dampak lingkungan, dampak sosial, dan keberlanjutan kelembagaan, dapat disimpulkan beberapa poin penting yang dapat membantu memandu langkah-langkah kebijakan di masa depan.

- 1) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; Salah satu keberhasilan utama kebijakan persampahan di Kota Baubau adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Melalui program-program edukasi dan kampanye, masyarakat telah semakin memahami pentingnya pemilahan sampah dan menjaga lingkungan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam kebijakan persampahan.
- 2) Tantangan Infrastruktur; Meskipun terdapat peningkatan dalam kesadaran masyarakat, masih ada tantangan terkait ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di wilayah pinggiran kota. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti pembangunan TPA yang lebih modern dan peningkatan jaringan pengangkutan sampah.
- 3) Upaya Peningkatan Efisiensi; Analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Penggunaan teknologi yang lebih efisien dan pengoptimalan proses operasional dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi ini akan membantu meningkatkan ketersediaan dana untuk investasi dalam infrastruktur dan program-program pengelolaan sampah yang lebih baik.

- 4) Tantangan Dampak Lingkungan; Meskipun terdapat perbaikan dalam penurunan polusi dan pengelolaan limbah, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan limbah, terutama dalam menghadapi tantangan pencemaran air. Investasi dalam teknologi pengolahan limbah yang lebih baik dan pengawasan yang ketat terhadap pembuangan limbah cair akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Baubau.
- 5) Pentingnya Dukungan Politik dan Keberlanjutan Kelembagaan; Kunci dari keberlanjutan kebijakan persampahan adalah dukungan politik yang berkelanjutan dan keberlanjutan kelembagaan. Pemerintah setempat perlu memastikan adanya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, serta kesiapan lembaga terkait untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan politik yang kuat dan kelembagaan yang berkelanjutan, implementasi kebijakan persampahan akan sulit untuk berhasil dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, di rekomendasikan beberapa saran antara lain:

- 1) Penguatan Infrastruktur; Pemerintah setempat perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pembangunan TPA yang lebih modern dan peningkatan jaringan pengangkutan sampah.
- 2) Peningkatan Efisiensi Operasional; Perusahaan pengelola sampah perlu terus melakukan inovasi dalam proses operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.
- 3) Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah; Diperlukan investasi dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah yang lebih baik untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah cair.
- 4) Penguatan Program Edukasi dan Kesadaran Masyarakat; Program-program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 5) Pemantapan Dukungan Politik dan Kelembagaan; Pemerintah setempat perlu memastikan adanya dukungan politik yang berkelanjutan dan membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung implementasi kebijakan persampahan.

Dalam menghadapi tantangan manajemen sampah, pendekatan evaluasi holistik merupakan instrumen penting untuk memahami kompleksitas dan mengevaluasi keberlanjutan kebijakan persampahan. Melalui kombinasi analisis efektivitas, efisiensi, dampak lingkungan, dampak sosial, dan keberlanjutan kelembagaan, kami dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan persampahan tidak hanya bergantung pada efektivitas teknis, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, dukungan politik yang berkelanjutan, dan keberlanjutan kelembagaan. Dengan menerapkan rekomendasi yang diusulkan, diharapkan Kota Baubau dapat mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah dan menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam membangun lingkungan yang bersih dan sehat.

Referensi

- [1] Bakti, R., R., & Mahendika, D. (2023). Membangun Masa Depan yang Lebih Baik: Mengatasi Tunawisma, Kesehatan Mental, Penyalahgunaan Zat, dan Ketenagakerjaan melalui Advokasi, Pendidikan, dan Kolaborasi Komunitas. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 335–344. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.373>
- [2] Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- [3] Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi*. Kencana.
- [4] Fadliah, N., Fatmawati, F., & Parawu, H. E. (2021). Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Governance Di Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(2), 108–118. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.6284>
- [5] Luviani, L. (2019). *Strategi Pemangku Kepentingan Pariwisata Kebun Teh Nglinggo Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal (Study Deskriptif)*. repo.apmd.ac.id.
- [6] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.

-
- [7] Mulyadi, M., Haryoso, P., & Wahyudi, R. (2020). Pembentukan Program Bank Sampah Guna Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menangani Permasalahan Sampah. *Wasana Nyata*, 4(1), 64–71. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v4i1.596>
- [8] Ngabalin, T., Habibie, A. F., & Darmawan, E. (2023). Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Kebijakan Pariwisata Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 13–21. <https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5839>
- [9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 1, 1 171 (1945).
- [10] Rinny, A. (2009). *Analisis Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) KOTA*.
- [11] Said, L.O., Mardiyono, & Noor, I. (2015). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau*.
- [12] Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- [13] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta.
- [14] Wulandari, A. (2018). Mengelola hubungan pemangku kepentingan dan harapan pemangku kepentingan. *Journal of Communication: ETTISAL*, 3(2), 63–70.